

Dokumen



RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. KERJASAMA EKONOMI

A. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata

1. Promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992
2. Menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992
3. Pertemuan Pengusaha Wisata ASEAN

B. Kerjasama Pangan, Pertanian dan Kehutanan

Koperasi Pertanian ASEAN

II. KERJASAMA NON-EKONOMI

- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi ASEAN
- B. Seminar Regional Tentang Keamanan

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. Hubungan ASEAN-AS
- B. Hubungan ASEAN-Kanada
- C. Hubungan ASEAN-MEE

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

I. KERJASAMA EKONOMI

A. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992

Siaran pers Sub Komite Pariwisata ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 12 April 1991 menjelaskan bahwa: (1) Jepang, Australia dan Jerman tetap menjadi sasaran utama promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992; (2) program promosi Forum Pariwisata ASEAN di Bandung bulan Januari 1991 akan segera dilancarkan; (3) alat promosi utama adalah film dengan masa putar 12 dan 24 menit yang memperagakan keistimewaan ASEAN akan diputar di pesawat terbang nasional negara-negara ASEAN dalam penerbangan antar bangsa (*Antara*, 12-4-1991).

2. Menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992

Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 22 April 1991 bahwa: (1) Indonesia akan menyelenggarakan festival seni budaya memperingati HUT ke-17 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sekaligus menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992; (2) Indonesia yang kaya seni budaya itu, mulai sekarang harus mengadakan inventarisasi di 69 daerah dan yang terbaik dapat dipentaskan pada festival tersebut; (3) festival seni yang bernafaskan agama Islam akan diadakan di Jakarta bulan November 1991 dengan menegenahkan 600 arsitektur mesjid; (4) seni budaya Indonesia terbuka terhadap pengaruh luar, unsur yang dinilai positif dapat dipetik sekaligus diolah untuk dijadikan budaya Indonesia; (5) hendaknya pemerintah daerah bersama masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan seni budaya untuk menarik wisatawan manca negara agar berlibur di Indonesia (*Angkatan Bersenjata*, 23-4-1991).

3. Pertemuan Pengusaha Wisata ASEAN

Pertemuan para Pengusaha ASEAN berlangsung di Nusa Dua Bali tanggal 29 Mei 1991 untuk membahas konsep standar pendidikan tenaga pariwisata yang dapat diterima oleh hotel-hotel berbintang di dunia internasional.

Sambutan tertulis Menparpostel Soesilo Soedarman,

pada pembukaan pertemuan itu sebagai berikut: (1) masalah ketrampilan tenaga kerja merupakan tantangan berat bagi pengembangan kepariwisataan dunia; (2) program latihan pariwisata ASEAN yang didukung dana dari MEE agar mendiskusikan pengembangan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan di masa mendatang; (3) masalah ketrampilan tenaga kerja bidang perhotelan di ASEAN perlu segera diatasi sebab kunjungan wisatawan manca negara ke kawasan ini terus meningkat; (4) bila pada tahun 1981 kunjungan wisatawan manca negara ke ASEAN mencapai 10 juta orang, maka pada tahun 1989 telah mencapai 19 juta orang dengan perolehan devisa US\$10 milyar; (5) pelatihan tenaga kerja pariwisata ASEAN dirintis sejak tahun 1986, tetapi baru dapat direalisasikan pada tahun 1989 dengan mendapat bantuan dari MEE (*Angkatan Bersenjata*, 30-5-1991).

Seusai pertemuan Deparpostel, Jonathan L. Parapak, mengatakan kepada pers bahwa: (1) pelayanan merupakan bagian utama dari usaha industri pariwisata, karena itu perlu standardisasi pelayanan wisata negara ASEAN; (2) standardisasi pelayanan harus dibahas secara matang agar menghasilkan rumusan dan kesepakatan yang dapat dijadikan dasar pengembangan kepariwisataan di ASEAN; (3) standar pelayanan kepada wisatawan di hotel berbintang lima di Indonesia selama ini cukup baik khususnya di Nusa Dua Bali, bahkan telah dijadikan contoh pengembangan kepariwisataan di dunia internasional; (4) pelayanan kepada wisatawan tidak perlu berlebihan, tetapi perlu mencerminkan citra nusantara dan faktor kebersihan yang merupakan sapta pesona (*Angkatan Bersenjata*, 30-5-1991).

B. KERJASAMA PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- Koperasi Pertanian ASEAN

Pertemuan Pengembangan Pusat Koperasi Pertanian ASEAN (*ASEAN Center for the Development of Agriculture Cooperatives* atau ACEDAC) berlangsung di Jakarta tanggal 13-18 Mei 1991 untuk membahas upaya pengembangan pertanian dan kehutanan di ASEAN.

Menteri Muda Pertanian RI, Sjarifuddin Baharsjah mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ACEDAC sangat penting bagi pertukaran informasi

riset dan pengembangan program pertanian di ASEAN; (2) pengalaman masing-masing negara anggota ASEAN sangat bermanfaat untuk mempercepat peningkatan program pengembangan pertanian di kawasan ASEAN (*Jakarta Post*, 15-5-1991).

Pertemuan sepakat membentuk Pusat Pengembangan (ACEDAC) dan menunjuk Prof. Dr. Wagiono Ismail dari Indonesia sebagai ketuanya (*Suara Pembinaan*, 20-5-1991).

Kepala Litbang Departemen Koperasi Dr. Muslimin Nasution mengatakan pada peresmian ACEDAC di Jakarta tanggal 18 Mei 1991 bahwa: (1) lembaga ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama koperasi di ASEAN; (2) ACEDAC bertujuan memberi bantuan bagi pengembangan koperasi-koperasi pertanian di ASEAN untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada; (3) ACEDAC bertugas menyebarluaskan informasi pembangunan perkoperasian sekaligus mempromosikan perdagangan di antara anggotanya (*Suara Pembinaan*, 20-5-1991).

II. KERJASAMA NON EKONOMI

Sidang Komite Kebudayaan dan Informasi ASEAN (*Committee of Culture and Information* atau COCI) ke-24 berlangsung di Prigen Pasuruan Jawa Timur tanggal 29 Mei 1991-1 Juni 1991 untuk membahas upaya peningkatan proyek budaya dan informasi menyambut tahun anggaran kerja 1991-1992 di bidang video, arkeologi, sastra dan seni. Di samping itu juga dibahas upaya peningkatan mutu profesi sineas muda yang merupakan hasil kerjasama dengan Jepang, Kanada dan Australia serta UNDP.

Menteri Penerangan RI, Harmoko mengatakan pada pembukaan pertemuan itu: (1) Indonesia menjadi pelopor keterbukaan informasi melalui siaran langsung televisi dengan menggunakan antena parabola atau DBS (*Direct Broadcasting Satellite*); (2) keterbukaan itu didasari kenyataan bahwa arus informasi dengan menerapkan kemajuan teknologi media massa tidak dapat dibendung lagi. Kemajuan itu mampu menembus ke seluruh wilayah secara serentak; (3) keperkasaan arus informasi itu tidak mungkin dihalangi secara teknis, baik dengan peralatan teknologi sejenis maupun yang lebih canggih; (4) untuk menghindari dampak ne-

gatif globalisasi informasi, diperlukan penanganan khusus melalui solidaritas pengelolaan media massa cetak dan elektronika antar sesama anggota ASEAN; (5) di kawasan ASEAN belum ada izin penggunaan DBS secara tegas, karena masih mempelajari dampak yang akan terjadi. Demikian pula di Indonesia diperkenankan tetapi dengan batasan tertentu untuk menjaga stabilitas nasional; (6) penerapan teknologi canggih mencerminkan keterbukaan informasi di Indonesia untuk mengikuti arus kemajuan tanpa harus hanyut (*Antara*, 29-5-1991); (7) ASEAN perlu meningkatkan kerjasama di bidang informasi dan kebudayaan untuk mempertahankan ciri khasnya di mata dunia; (8) peningkatan kerjasama ini dapat dilakukan melalui peningkatan arus informasi langsung dan lebih teratur untuk membangun identitas regional negara masing-masing; (9) kerjasama COCI bermanfaat untuk mencegah kemungkinan dampak negatif globalisasi di kawasan ASEAN yang memiliki ciri tersendiri; (10) semangat kebersamaan serumpun negara-negara ASEAN sudah menjadi modal dasar untuk mempertahankan ciri khas budayanya (*Merdeka*, 30-5-1991).

Sementara itu Pemimpin Umum Kantor Berita Malaysia, Bernama, Mohammad Raus Borhan mengatakan bahwa: (1) keterbukaan informasi yang senantiasa membawa dampak negatif perlu ditanggulangi secara nasional dan regional; (2) penanganan ini untuk menjaga dan sekaligus mengembangkan pola budaya antara generasi di suatu kawasan yang memiliki ciri-ciri tersendiri; (3) salah satu cara yang ditempuh oleh ASEAN untuk melestarikan kebudayaan khas secara regional adalah melalui pertukaran informasi antar kantor berita (*ANEX* atau *ASEAN News Exchange*); (4) kebijakan dan penerapan tatanan informasi di Indonesia yang memiliki kantor berita dan studio televisi tertua di ASEAN serta mampu menjangkau wilayah yang luas dibanding dengan negara lain dapat dijadikan pengalaman yang positif (*Antara*, 29-5-1991).

Hasil-hasil sidang antara lain COCI sepakat untuk: (1) meningkatkan promosi budaya khas ASEAN untuk mengimbangi dominasi globalisasi arus informasi; (2) mengadakan promosi kebudayaan melalui berbagai sarana komunikasi seperti media massa dan program duta budaya ASEAN ke berbagai negara; (3) menggalang kerjasama secara global agar ASEAN mampu menjadi salah satu potensi regional seperti MEE (*Antara*, 3-6-1991).

B. SEMINAR REGIONAL TENTANG KEAMANAN

Seminar regional pertama tentang keamanan dengan tema "ASEAN and the Asia Pacific Region: Prospect for Cooperation in 1990s", berlangsung di Manila tanggal 6-7 Juni 1991, dihadiri oleh pejabat tinggi dan cendekiawan dari 20 negara, termasuk AS, Uni Soviet, Jepang, Cina dan ASEAN.

Menlu Filipina, Raul Manglapus, mengatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) ASEAN agar memperjuangkan konsensus tentang keamanan dan integrasi ekonomi yang kuat; (2) AS mempunyai peranan untuk memelihara perdamaian; (3) pasca Perang Dingin menunjukkan bahwa keamanan regional harus disusun di wilayah negara itu sendiri bukan di ibukota beberapa negara adidaya; (4) geografi ASEAN dan perbedaan besar dalam ukuran ekonomi negara-negara anggotanya menyebabkan organisasi tersebut sulit mendukung integrasi ekonomi (*Antara*, 6-6-1991); (5) Asia Tenggara tidak pernah sepakat untuk menangani isu tentang keamanan karena selama Perang Dingin beberapa negara kawasan itu berpihak pada salah satu negara adidaya dan beberapa negara lainnya tidak berpihak; (6) konsensus tentang keamanan merupakan pilihan yang dituju dalam seminar itu; (7) semua pihak yang berpartisipasi dalam seminar agar terbuka dalam sikap politiknya yang berhubungan dengan masalah yang menjadi perselisihan paham; (8) ASEAN diharapkan mampu menyatakan kesamaan pendapat tentang masalah keamanan, termasuk konsep ZOPFAN yang disepakati pada tahun 1971; (9) tanggung jawab keamanan suatu wilayah harus dilahirkan dari wilayah itu sendiri; (10) tiang utama ASEAN ada tiga, yaitu ekonomi, politik dan keamanan; (11) syarat utama merencanakan suatu integrasi ekonomi harus ada bentuk perjanjian ekonominya (*economic treaty*) (*Kompas*, 7-6-1991).

Dubes Indonesia untuk Filipina, Soewarso Hardjosoedarmo, mengatakan: (1) resiliensi (ketahanan) ASEAN sebaiknya diutamakan daripada pembicaraan yang menyangkut hubungan regional Asia Pasifik; (2) ASEAN sebaiknya memenuhi apa yang menjadi tujuan Deklarasi Manila, sebelum membahas masalah Asia Pasifik; (3) ruang lingkup yang dibahas dalam seminar terlalu luas sedangkan kepentingan masing-masing negara beragam; (4) ketahanan hubungan antar negara ASEAN seharusnya diwujudkan lebih dulu sebelum melangkah ke kawasan yang lebih luas; (5) kriteria peserta seminar tidak jelas apakah datang dengan kapasitas pribadi atau mewakili pemerintah; (6) kesan hasil seminar akan dipaksakan sebagai masukan bagi perte-

muan tingkat tinggi ASEAN di Singapura tahun 1992; (7) beberapa negara bersikap seakan-akan ZOPFAN tidak ada, dan ingin menerapkan kerjasama dengan negara di luar ASEAN; (8) ASEAN dan negara-negara besar harus menghormati ZOPFAN; (9) ia tidak setuju jika pertemuan tersebut mengarah kepada pembenaran kehadiran pasukan AS di Subic dan Clark, walaupun menurut AS stabilitas ASEAN terjamin dengan kehadiran AS di dua pangkalan itu; (10) kehadiran pangkalan AS di Filipina itu hanya untuk menjaga kepentingannya sendiri atas pertimbangan geostrategis; (11) ASEAN harus mampu menjaga keamanannya sendiri dengan menjaga stabilitas nasional maupun regional yang bebas dari pengaruh kekuatan luar (*Kompas*, 7-6-1991).

Mantan Menteri Pertahanan Filipina, Rafael Ileta, mengatakan: (1) pertemuan regional masalah keamanan ini mempunyai arti penting untuk menggali pendapat dari negara-negara teranga ASEAN tentang konsep keamanan ASEAN; (2) sampai sejauh ini konsep ZOPFAN tidak efektif; (3) dalam kondisi dan situasi sekarang yang dihadapi ASEAN tentang masalah ZOPFAN hanya ada dua kemungkinan, yaitu meninjau kembali ZOPFAN atau pembubaran ZOPFAN; (4) dalam berbagai konperensi yang diselenggarakan ASEAN, masalah militer tidak pernah dibicarakan (*Kompas*, 7-6-1991).

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Richard Woolcott, mengatakan: (1) sebagian besar peserta seminar setuju dipertahankannya pangkalan militer di wilayah Asia Pasifik; (2) sampai sekarang belum ada ancaman tertentu di wilayah Asia Pasifik, tetapi ancaman datang dari ketidakpastian dan konflik yang tidak diselesaikan di kawasan tersebut; (3) pertemuan ini sangat tepat untuk membicarakan masalah keamanan regional, bukan hanya ASEAN tetapi juga melibatkan negara-negara lainnya; (4) Australia mendesak Filipina untuk mengizinkan pasukan AS guna terus menggunakan pangkalan militernya; (5) Australia menganggap pangkalan militer AS penting untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Asia; (6) Australia mengharap agar AS dan Filipina dapat menyepakati persyaratan-persyaratan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak demi kelanjutan keberadaan pangkalan AS di Filipina (*Polita*, 8-6-1991).

Dirjen Bidang Asia Pasifik Deplu Filipina, Romualdo Ong, mengatakan: (1) para peserta seminar hadir dalam kapasitas pribadi bukan mewakili negaranya; (2) ancaman terbesar di wilayah Asia Pasifik ada-

lah masalah stabilitas, kecacauan intern, keadaan dalam negeri masing-masing negara, perebutan wilayah dan masalah politik seperti di Kamboja; (3) kerjasama keamanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berbagai bidang (*Kompas*, 8-6-1991).

Pejabat Senior pada Kementerian Luar Negeri AS, Desaix L. Anderson, mengatakan: (1) di masa mendatang AS akan melanjutkan peranannya di kawasan Asia Tenggara apabila masih dibutuhkan (*Kompas*, 8-6-1991); (2) perjanjian baru AS-Filipina mengenai kontrak pangkalan Clark dan Subic belum disepakati (*Pelita*, 8-6-1991).

Panglima Besar Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Hashim Mohamad Ali, mengatakan: (1) Laut Cina Selatan akan menjadi wilayah konflik di Asia dan mengundang ikut campurnya kekuatan negara-negara di luar kawasan; (2) semua negara yang mengakui wilayah teritorialnya di kawasan Laut Cina Selatan sudah mengirim pasukannya, kecuali Brunei Darussalam; (3) negara-negara ASEAN agar melakukan usaha bersama untuk melawan terorisme internasional; (4) ia menolak usul pembentukan pakta pertahanan multilateral yang melibatkan semua atau beberapa negara ASEAN (*Merdeka*, 8-6-1991).

Anggota Akademi Pertahanan Nasional Jepang, Masashi Nishihara, mengatakan bahwa jika pasukan AS ditarik dari kawasan Asia Tenggara, maka kemungkinan Cina akan mengisi kekosongan kekuatan tersebut (*Pelita*, 8-6-1991).

Wakil Direktur Hubungan Internasional Beijing, Jin Dexiang, mengatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dapat mengarah kepada friksi yang meningkat antara Washington-Tokyo yang memungkinkan terjadinya konflik ekonomi dan politik (*Pelita*, 8-6-1991).

Direktur CSIS, Jusuf Wanandi, mengatakan: (1) persaingan ekonomi AS dan Jepang serta berkurangnya ketergantungan Jepang terhadap Barat setelah ancaman dari Uni Soviet, akan memicu ketegangan dalam hubungan AS-Jepang di masa yang akan datang; (2) ketegangan hubungan AS-Jepang akan meningkat karena persaingan ekonomi; (3) rakyat AS melihat Jepang sebagai ancaman daripada Uni Soviet; (4) Jepang dinilai ingin menantang supremasi ekonomi AS dan Jepang ingin memainkan peranan politik yang lebih besar di tingkat dunia (*Bisnis Indonesia*, 8-6-1991).

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIA-LOG

A. HUBUNGAN ASEAN-AS

Mantan Dubes AS untuk Singapura, John H. Holdrige, mengatakan di Kansas City, Michigan, AS tanggal 12 Juni 1991 bahwa: (1) ASEAN merupakan pasar besar yang prospektif bagi produk asing; (2) kondisi perekonomian ASEAN jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Eropa Timur; (3) Eropa Timur tidak mempunyai infra struktur, tenaga ahli dan manajemen yang baik, tetapi ASEAN memilikinya; (4) perekonomian Korea Selatan dan Taiwan maju, tetapi skala ekonomi kedua negara tersebut kecil; (5) Jepang sedang dalam proses menguasai seluruh pasar AS; (6) dunia bisnis AS harus meletakkan dasar perekonomian yang kuat di ASEAN; (7) negara-negara ASEAN tidak takut berbisnis dengan AS; (8) negara-negara ASEAN menerima kehadiran warga AS untuk memperluas skala bisnis di ASEAN; (9) kesempatan bisnis bagi AS antara lain di bidang eksplorasi minyak dan gas; (10) Indonesia tidak menyetujui 15 kontrak tambang bagi pengusaha AS; (11) pertumbuhan infrastruktur ASEAN, kecuali Singapura, sangat ketinggalan dari pertumbuhan ekonominya; (12) pengembangan usaha bisnis di ASEAN tidak mudah; (13) untuk mengembangkan kegiatan bisnis di AS, dunia usaha tidak bisa bergantung pada koneksi pemerintah; (14) AS tidak bisa lagi mempertahankan pasar dalam negerinya karena telah dikuasai pengusaha asing; (15) dunia usaha AS harus mempertahankan pasar ASEAN yang berpenduduk 320 juta dan menampung US\$20 milyar impor AS selama tahun 1990 (*Kompas*, 13-6-1991).

Pertemuan ASEAN-AS ke-10 berlangsung di Washington tanggal 20-21 Juni 1991, untuk membahas masalah ekonomi, perdagangan, investasi serta beberapa perbedaan persepsi antara ASEAN dan AS.

Dirjen Bidang Politik Luar Negeri AS, Robert Kimmit, mengatakan: (1) hubungan ekonomi antara ASEAN dan AS meningkat; (2) perdagangan Indonesia-AS lebih besar jika dibandingkan dengan perdagangan AS-Eropa Timur; (3) perdagangan Malaysia-AS lebih besar jika dibandingkan dengan perdagangan AS-Soviet; (4) stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara selama 20 tahun terakhir ini mantap.

Dubes Muangthai untuk AS, Vitthaya Vejajiva, mengatakan: (1) hubungan perdagangan dan ekonomi ASEAN-AS meningkat; (2) penduduk ASEAN yang

berjumlah 320 juta merupakan pasar yang potensial; (3) proyek-proyek pembangunan prasarana di sektor swasta dan pemerintah di kawasan ASEAN menarik minat para pengusaha AS; (4) ASEAN melihat AS sebagai sumber pasar modal dan teknologi; (5) pertemuan ASEAN-AS diharapkan dapat meningkatkan kerjasama berbagai bidang di masa mendatang.

Dubes RI untuk AS, AR Ramly, mengatakan: (1) pertemuan ASEAN-AS mempunyai arti penting; (2) pertemuan tersebut merupakan ajang pertukaran informasi serta pemecahan masalah yang bersifat internasional maupun regional; (3) pertemuan ASEAN-AS sekarang ini juga merupakan persiapan pertemuan tingkat menteri antara ASEAN-AS yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Juli 1991; (4) pertemuan ASEAN-AS sekarang ini merupakan pertemuan tingkat Dirjen, guna mempersiapkan post ministerial meeting ASEAN-AS (*Suara Pembaruan*, 21-6-1991).

Dalam pertemuan itu pihak ASEAN: (1) mendesak AS untuk menanggalkan kebijakan sepihak dalam hubungan dagang yang dinilai bertentangan dengan prinsip GATT; (2) menegaskan bahwa Undang-undang Anti Dumping seksi 301 Omnibus Trade Act 1988, dan beberapa peraturan dagang AS lainnya bertentangan dengan prinsip GATT yang berusaha meluaskan perdagangan dunia tanpa hambatan dan dapat disalahgunakan oleh kepentingan tertentu; (3) menyatakan bahwa Undang-undang Anti Dumping telah digunakan pihak tertentu di AS dengan berbagai petisi atas dasar tuduhan-tuduhan bahwa negara-negara ASEAN melakukan politik dumping untuk melawan produk serupa AS; (4) menilai bahwa seksi 301 Omnibus Trade act 1988 di samping mengharuskan pemerintah AS untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara yang dianggap menjalankan politik dagang tidak adil juga dapat menghancurkan GATT; (5) menghendaki agar isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak intelektual dan hak cipta diselesaikan dalam sistem konsultasi di bawah GATT, bukan lewat tindakan sepihak; (6) prihatin atas kebijakan dagang akhir-akhir ini, terutama masalah hubungan dagang yang dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hendaknya ditujukan pada sumber masalahnya bukan pada kegiatan dagang; (7) prihatin terhadap gagasan pembentukan persetujuan dagang bebas Amerika Utara (*North America Free Trade Agreement* - NAFTA) yang mencakup AS, Kanada dan Meksiko. Masuknya Meksiko ke dalam persetujuan itu dapat mengalihkan modal AS dan Kanada dari ASEAN ke

Meksiko yang upah buruhnya murah dan sumber lainnya melimpah.

Pihak AS menyatakan: (1) dalam masalah perdagangan dan investasi, ASEAN dan AS melancarkan suatu strategi promosi bersama; (2) ASEAN telah menikmati US\$8 milyar perdagangannya dengan AS; (3) AS akan mengurangi laju perdagangannya dengan ASEAN jika ASEAN terus menikmati surplus besar dan mempertahankan penghalang atas produk dan jasa AS yang kompetitif masuk ASEAN; (4) mendesak ASEAN untuk menghilangkan batasan jumlah saham dan peraturan pajak berganda yang boleh dimiliki perusahaan AS di bidang investasi; (5) mendesak ASEAN untuk memberikan perhatian atas perlindungan hak-hak intelektual, merk dagang dan hak paten (*Angkatan Bersenjata*, 22-6-1991).

Pernyataan bersama mengatakan: (1) setuju untuk mengambil sikap keras dalam masalah perdagangan hasil pertanian pada Putaran Uruguay guna negosiasi dagang multilateral; (2) sependapat bahwa kemajuan ekonomi akan tergantung pada sebuah sistem perdagangan multilateral yang kuat; (3) menghendaki dicapainya kesepakatan akhir dari Putaran Uruguay; (4) setuju dicapainya sebuah paket hasil yang berimbang, berarti dan bermanfaat bagi semua negara tentang sistem perdagangan hasil pertanian yang masih menjadi masalah dengan pihak Eropa; (5) sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan narkoba dan perlindungan lingkungan hidup; (6) sepakat menegaskan kembali dukungannya atas upaya kedua ketua bersama Konperensi Paris tentang Kamboja, yaitu Menlu Indonesia dan Menlu Perancis, guna memulihkan kemerdekaan dan perdamaian di Kamboja berdasarkan kerangka kerja PBB (*Antara*, 23-6-1991).

Richard Solomon mengatakan: (1) perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan bukan untuk membuat hambatan-hambatan tarif baru bagi pihak luar, tetapi dimaksudkan sebagai wahana untuk mendinamisasi pasar; (2) bagi ASEAN, AS adalah pasar ekspor terbesar dan mitra dagang nomor dua terbesar setelah Jepang. ASEAN bagi AS merupakan rekan dagang terbesar kelima; (3) tahun 1980 nilai perdagangan ASEAN-AS mencapai US\$23 milyar, sedangkan tahun 1990 meningkat hampir dua kali lipat mencapai US\$44 milyar (*Antara*, 23-6-1991).

B. HUBUNGAN ASEAN-KANADA

Direktur CANASEAN (Program Kanada dan ASEAN) Edwin Wong mengatakan di Vancouver tanggal 14 Juni 1991 bahwa: (1) pendekatan antara ASEAN dan Kanada di bidang perdagangan belum mengalami perkembangan yang cukup berarti; (2) ia merencanakan suatu forum khusus yang dapat mempertemukan kepentingan dunia usaha ASEAN dengan Kanada; (3) melalui program CANASEAN, masyarakat bisnis kedua pihak diharapkan dapat memahami budaya masing-masing, dengan demikian pendekatan hubungan bisnis dapat dilakukan lebih berhasil. Mekanismenya adalah dengan mempertemukan pengusaha, manajer dan pejabat pemerintah kedua negara melalui seminar, lokakarya, kunjungan ke berbagai perusahaan serta observasi lapangan; (4) program CANASEAN yang dimulai sejak tahun 1989 dilaksanakan dengan melibatkan fasilitator ahli, pengusaha dan pejabat pemerintah serta partisipan; (5) program CANASEAN dirancang agar kalangan pengusaha kedua negara dapat menemukan mitra yang cocok dan dapat memelihara hubungan kerja yang baik; (6) sponsor program CANASEAN adalah Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA) dan Kementerian Penduduk Provinsi British Columbia Kanada; (7) tahun 1988 nilai perdagangan ASEAN-Kanada relatif kecil, mencapai US\$2,64 milyar; (8) pihak-pihak yang terkait di kedua negara agar mendukung program CANASEAN (*Bisnis Indonesia*, 15-6-1991).

C. HUBUNGAN ASEAN-MEE

Forum Panel Global 1991 yang diprakarsai oleh The European Center berlangsung di Amsterdam tanggal 8-10 April 1991, dihadiri oleh Presiden Turki, Turgut Ozal, Wapres Komisi Eropa, Frans Andriessen, Menlu Belanda, Hans van den Broek, Mantan Kanselir Jerman Barat, Helmut Schmit, Ketua Partai Buruh Israel, Shimon Peres dan Mantan Menlu AS, Henry Kissinger serta pimpinan bisnis, politik dan pers dari berbagai negara.

Dirjen Badan Ekonomi dan Pembangunan Filipina (NEDA), Cayetano W. Paderanga Jr., mengatakan: (1) mengalirnya investasi asing ke kawasan Asia Tenggara menguntungkan negara-negara ASEAN; (2) masuknya modal dan teknologi asing yang terus meningkat menimbulkan ekonomi negara-negara ASEAN; (3) apabila kecenderungan arus investasi terus meningkat,

ASEAN akan menjadi fokus investasi asing dalam dasawarsa 1990-an; (4) laporan IMF tahun 1991 tentang Produk Domestik Bruto (GDP) negara-negara berkembang di Asia meningkat menjadi 5,5%; (5) berakhirnya Perang Teluk memberi peluang bagi meningkatnya pertumbuhan GDP di kawasan Asia Tenggara; (6) evolusi dalam industri-industri khusus yang padat karya di negara-negara ASEAN, kecuali Singapura, banyak menarik minat negara-negara maju untuk menanam modalnya di bidang industri; (7) negara-negara ASEAN terus berupaya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan; (8) ASEAN khawatir tentang berlakunya Pasar Tunggal Eropa 1992. Pasar Tunggal Eropa hanya akan meningkatkan perdagangan antar negara ME, bukan menciptakan peluang bagi pihak ketiga; (9) ASEAN khawatir tentang standarisasi teknis apabila hal itu digunakan oleh ME sebagai bentuk hambatan non-tarif; (10) ASEAN khawatir tentang standar yang dipakai untuk menentukan margin anti dumping sementara, yang didasarkan atas kebijakan yang diberlakukan di negara-negara maju, yang akan mengakibatkan produk-produk ASEAN mengalami kesulitan memasuki pasar ME; (11) hasil perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay bulan Desember 1990 tampaknya memperkuat ketakutan ASEAN tentang kemungkinan proteksionis Eropa pasca 1992; (12) ASEAN mengharapkan suatu perbaikan dalam akses pasar bagi produk-produk pertanian atas kegagalan ME melakukan reformasi kebijakan umum tentang pertanian (CAP) (*Antara*, 10-4-1991).

Menristek BJ Habibie mengatakan: (1) perkembangan dan pertumbuhan di Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya pada dasawarsa 1990-an meningkat; (2) masih terdapat kesenjangan pendapatan yang menyolok antara negara-negara ASEAN dan ME; (3) total produksi nasional bruto (GNP) ASEAN tahun 1988 mencapai US\$232.855 atau 5,29% dari jumlah keseluruhan GNP ke-12 negara ME tahun 1988; (4) produk dan pendapatan total rata-rata per kapita ASEAN sekarang masih kecil jika dibandingkan dengan produk dan pendapatan ME; (5) ASEAN harus meningkatkan perhatian pada pembangunan prasarana ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar (*Kompas*, 10-4-1991); (6) investasi untuk membangun prasarana ekonomi dan penyediaan kebutuhan pokok di negara ASEAN harus dipenuhi, baik dengan modal dalam negeri ASEAN maupun dari luar ASEAN; (7) jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 56,5% dari total penduduk ASEAN dan lebih dari 40% dari jumlah penduduk Asia Tenggara merupakan segmen terbesar dari pasar Asia

Tenggara; (8) stabilitas politik Indonesia sangat penting bagi pasar Asia Tenggara (*Merdeka*, 10-4-1991); (9) ia mengundang dunia usaha Belanda untuk berperan dalam pembangunan industri di Indonesia melalui penanaman modal dan bantuan keahlian. Pembangunan industri itu meliputi industri pesawat terbang, kapal dan telekomunikasi (*Bisnis Indonesia*, 10-4-1991).

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ME berlangsung di Luxemburg tanggal 31 Mei 1991 dihadiri oleh para Menlu dari negara-negara ASEAN dan ME untuk memperbarui perjanjian kerjasama antara kedua kelompok regional tersebut.

Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) dalam pembaruan kerjasama ASEAN-ME, ASEAN akan mengutamakan peningkatan kerjasama industri dan alih teknologi modern; (2) sejak tahun 1980 negara-negara ASEAN dan ME secara teratur mengadakan pertemuan dalam rangka mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan; (3) pertemuan akan membahas langkah-langkah kerjasama menghadapi perubahan-perubahan dunia; (4) pola kerjasama ASEAN-ME perlu diubah ke arah pengembangan kerjasama yang lebih adil dan seimbang yang mencerminkan kepentingan dasar dan kedudukan kedua belah pihak; (5) perkembangan dan pertumbuhan negara ASEAN meningkat dan stabil; (6) negara-negara ASEAN berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, rata-rata 7% per tahun dibandingkan negara-negara Eropa yang hanya 2-3% per tahun (*Antara*, 31-5-1991); (7) negara-negara ASEAN tidak ingin menjadi kelompok yang selalu minta bantuan saja (*Kompas* 1-6-1991).

Komisiner ME Abel Matutes mengatakan: (1) ME menerima usulan ASEAN tentang peningkatan bantuan di bidang industri; (2) menyetujui kerjasama di bidang iptek, pendidikan dan penanaman modal untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar internasional (*Kompas*, 1-6-1991).

Menlu Luxemburg, Jacques Poos, mengatakan: (1) kebijaksanaan bantuan ekonomi ME harus dihubungkan dengan pelaksanaan hak-hak asasi dan kemajuan demokrasi di negara penerima; (2) kriteria kebijaksanaan bantuan ekonomi ME dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi dan kemajuan demokrasi di negara penerima, bukan hanya sebagai pertanyaan terhadap legitimasi, tetapi merupakan sarana terpenting dalam mencapai kemajuan ekonomi (*Kompas*, 1-6-1991).

Menlu Perancis, Roland Dumas, mengatakan: (1) hak-hak asasi, keamanan dan kerjasama ekonomi sa-

ngat diperlukan untuk mempercepat kemajuan; (2) ASEAN bukan satu-satunya kelompok yang menerima kecaman tentang masalah hak asasi manusia (*Kompas*, 1-6-1991).

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAI-KONFLIK KAMBOJA

Pertemuan lanjutan ke-2 Ketua Bersama Konperensi Paris (PICC) dengan ke-12 anggota Dewan Tertinggi Nasional Kamboja (SNC) berlangsung di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991 untuk membahas masalah demiliterisasi, pencegahan praktek genocide dan masalah hubungan pemerintahan interim PBB dengan SNC.

PM Kamboja dukungan Hanoi, Hun Sen, mengatakan: (1) perlu dibentuk badan semacam pengadilan (tribunal) bagi mereka yang bertanggung jawab atas terbunuhnya kurang lebih sejuta penduduk Kamboja pada akhir tahun 1970; (2) konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan nasional tidak menyatakan bahwa seorang kepala negara atau kepala pemerintahan akan dikecualikan dari kewajiban untuk bertanggung jawab. Pernyataan ini bukan untuk mewakili pihak pengadilan tetapi merupakan usul pentingnya suatu proses pengadilan bagi kejahatan Khmer Merah (*Antara*, 2-6-1991).

Pemimpin kelompok nasionalis KPNLF Son Sann mengatakan: (1) rencana perdamaian lima pasal kelima anggota tetap DK-PBB sudah diterima oleh keempat faksi yang berselisih di Kamboja, yaitu KPNLF, Sihanoukist, Khmer Merah dan pemerintah Phnom Penh pada pertemuan 10 September 1990; (2) kelima pasal itu menyangkut pemerintahan sementara sebelum pemilu yang bebas, pengaturan militer dalam masa transisi, pemilu di bawah pengawasan PBB; perlindungan hak asasi manusia dan jaminan internasional atas kemerdekaan dan netralitas Kamboja; (3) jika pasukan dan orang-orang Vietnam ditarik dari Kamboja, pemimpin Khmer Merah, Pol Pot, dan pengikutnya tidak akan punya dalih apa pun untuk kembali berkuasa (*Antara*, 2-6-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) Indonesia dan Perancis selaku ketua bersama PICC akan menyelesaikan masalah Kamboja secara menyeluruh; (2) para Menlu Eropa menerima baik penjelasan ketua bersama PICC tentang perdamaian Kamboja; (3) pertemuan ke-2 PICC dengan SNC merupakan kelanjutan dari per-

temuan pertama di Paris bulan Desember 1990; (4) keseluruhan rancangan persetujuan tentang penyelesaian masalah Kamboja telah dibicarakan di pertemuan Luxemburg tanggal 31 Mei 1991 dan telah dikeluarkan suatu komunike bersama yang menyatakan adanya kesepakatan antara semua anggota SNC tentang isu fundamental; (5) fokus pertemuan itu yaitu adalah masalah demiliterisasi, pencegahan praktek genocide dan masalah hubungan pemerintahan interim PBB dengan SNC; (6) masalah penyelesaian Kamboja bukan untuk kepentingan rakyat Kamboja sendiri tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis dan kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara (*Antara*, 2-6-1991).

PM Kamboja dukungan Hanoi, Hun Sen, mengatakan: (1) jika persetujuan mengenai Sihanouk menjadi pemimpin SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya, maka komposisi SNC adalah tujuh wakil dari pihak tiga pemerintah Phnom Penh dan tujuh wakil dari pihak tiga koalisi CGDK; (2) kesepakatan itu belum diterima oleh Khmer Merah.

Pangeran Sihanouk mengatakan: (1) ia bersedia menjadi Ketua SNC jika ketua bersama PICC, Hun Sen dan pihak-pihak lain setuju; (2) jika ia berhalangan, ia akan menunjuk seorang wakil yang bersama Hun Sen akan bertindak sebagai wakil ketua bersama SNC secara temporer; (3) kedua wakil bersama PICC dapat bertindak sebagai Ketua SNC (*Antara*, 3-6-1991).

Dalam pertemuan konsultatif PICC dengan SNC, PM Hun Sen mengusulkan agar dalam naskah 26 November 1990 tentang penggunaan istilah kebijakan dan praktek di masa lampau diganti dengan istilah genocide (*Kompas*, 4-6-1991).

Pertemuan ke-2 PICC dengan SNC berakhir dengan mencatat perkembangan penting terutama yang menyangkut isu mekanisme kepemimpinan Dewan yang mewakili kedaulatan rakyat Kamboja.

Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) isu mekanisme kepemimpinan SNC dapat diselesaikan berkat adanya kesepakatan atas penunjukan Sihanouk sebagai ketua SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya; (2) dipilihnya Sihanouk sebagai ketua SNC dan Hun Sen sebagai wakilnya bukan merupakan suatu hal yang baru; (3) persetujuan yang memungkinkan Sihanouk menunjuk penggantinya jika ia sakit atau berhalangan yang bersama dengan Hun Sen akan menjadi wakil ketua bersama dan bertindak sebagai ketua secara bergantian adalah merupakan perkembangan baru; (4) mekanisme itu dapat menghilangkan kekhawatiran pihak-pihak

tertentu mengenai keinginan Hun Sen untuk mengambil alih kursi ketua SNC apabila terjadi sesuatu pada Sihanouk; (5) diharapkan agar pelantikan ketua dan wakil ketua SNC terlaksana dan SNC dapat segera berfungsi sehingga dapat menyumbang upaya pencapaian perdamaian di Kamboja; (6) gencatan senjata agar dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja; (7) waktu bagi penyelesaian masalah Kamboja hampir habis, artinya rakyat Kamboja tidak dapat secara terus-menerus menderita karena perang; (8) para Menlu negara-negara yang terlibat dalam penyelesaian masalah Kamboja yang telah berlangsung selama 12 tahun akan menemui kesulitan bila terus mengadakan pertemuan (*Antara*, 5-6-1991).

PM Hun Sen mengatakan: (1) sidang berakhir dengan mencatat beberapa kemajuan penting dan bukan suatu kegagalan; (2) ia menolak bahwa faksinya tidak dapat menerima rancangan penyelesaian konflik oleh lima anggota tetap DK-PBB; (3) kesepakatan tentang mekanisme kepemimpinan SNC merupakan hal yang penting sebab Dewan ini merupakan jantung bagi penyelesaian masalah Kamboja; (4) mekanisme kepemimpinan SNC tidak dapat dipisahkan dari rancangan perdamaian lima anggota tetap DK-PBB; (5) ia mengusulkan perubahan hal-hal yang menyangkut upaya pencegahan terulangnya praktek pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja (*Antara*, 5-6-1991); (6) ia dan Sihanouk sepakat untuk menghentikan bantuan militer dari luar negeri guna mengakhiri konflik Kamboja; (7) ia mengusulkan agar hak veto Khmer Merah atas berbagai usulan perdamaian dicabut, sebab hak veto hanya menghambat proses penyelesaian konflik Kamboja; (8) ia mendesak agar SNC segera berfungsi; (9) tanpa Khmer Merah SNC tetap dapat berjalan (*Merdeka*, 5-6-1991).

Pemimpin Khmer Merah Khieu Samphan mengatakan: (1) pihak Khmer Merah telah menerima gencatan senjata yang dimulai sejak awal Mei 1991; (2) ia mendesak pemerintah Phnom Penh untuk menerima usulan perdamaian PBB; (3) ia keberatan atas usul mekanisme baru yang menyangkut keinginan Hun Sen menjadi wakil ketua SNC, karena pada waktu pembentukan SNC di Jakarta bulan September 1990 tidak ada penyebutan tentang wakil ketua SNC; (4) ia menginginkan penempatan Badan Pemerintahan Peralihan PBB (UNTAC) di Kamboja dan pasukan pengawas perdamaian PBB untuk mengawasi segala aspek dalam pencarian penyelesaian politik secara menyeluruh dan pengaturan pemilu yang bebas (*Antara*, 5-6-1991).

Menteri Muda Luar Negeri Perancis, Alain Vivien, mengatakan ada tiga kesimpulan dari sidang PICC dengan SNC, yaitu: (1) masalah teknis dari perbedaan soal interpretasi diharapkan dapat diselesaikan; (2) ke-

sepakatan Sihanouk-Hun Sen merupakan peristiwa penting sehingga dapat mendorong ke arah penyelesaian masalah Kamboja; (3) perlu dicapai syarat-syarat perundingan guna menghindari polemik (*Kompas*, 5-6-1991).

